# PROMING

# SEMINAR NASIONAL KEPENDUDUKAN

2017

"PERAN KELUARGA BERENCANA DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"







Kerjasama:

Program Studi Magister KLH Universitas Negeri Gorontalo dengan

BKKBN Provinsi Gorontalo

# **PROSIDING**

# SEMINAR NASIONAL KEPENDUDUKAN TAHUN 2017

Tema:

"Peran Keluarga Berencana dalam Pembangunan Berkelanjutan"

Gorontalo, 29 Juli, 2017

# Speaker:

Dr. Sonny Harry B. Harmadi, ME Prof. Dr. Nelson Pomalingo, M,Pd Dr. Sukamdi, M.Sc H. Nofrijal, SP.MA

Program Studi Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup (KLH) Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo

# **PROSIDING**

# SEMINAR NASIONAL KEPENDUDUKAN TAHUN 2017

Tema:

"Peran Keluarga Berencana dalam Pembangunan Berkelanjutan"

Komite Pelindung:

Rektor Universitas Negeri Gorontalo : Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd

Kepala BKKBN Provinsi Gorontalo : Abdullah Kema, SE, M.Si

Pengarah/Penasehat: Prof.Dr. H.Sarson W.Dj.Pomalato, M.Pd

Prof. Dr. Yulianto Kadji, M.Si Prof. Dr. Hj.Ruslin Badu, M.Pd Dr. Dewi Wahyuni K.Baderan, M.Si

Panitia : Dr. Sri Endang Saleh, M.Si

dr.Rossy Herawati, M.Kes Dr. Laksmin Kadir, M.Kes Winangsih Kadir, SP Agustin Yunus, SE Linda Pulukadang, S.Pt

dr.Hartati Biki

Ni Nengah Wati, S.KM

Reviewer : Prof. Dr. Ramli Utina, M.Pd

Dr. Fitriyane Lihawa, M.Si Dr. Margaretha Solang, M.Si Dr.Marini Susanti Hamidun, M.Si

Dr. Sukirman Rahim, M.Si

Editor : Siti Amelia Gobel, S.Pd, Puput Wirawati Pertiwi, Dirahayu Astuti

Layout : Ahmad Fakih, S.Pd

Farid SM, S.Pd Harmudin, S.Pd Agustinus, S.Pd

ISBN: 978 602 51019 0 8

@2017 by Badan Penerbit Prodi Masister KLH Pacasarjana Universitas Negeri Gorontalo

Badan Penerbit Prodi Magister KLH Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo Gedung Pascasarjana Kampus I, Kampus UNG Jl. Jenderal Sudirman No.06 Kota Gorontalo 96128 www.pps@ung.ac.id

Bekerja sama dengan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Gorontalo

#### KATA PENGANTAR

Ketua Program Studi Magister Kependudukan Dan Lingkungan Hidup Seminar Nasional Kependudukan 2017 Universitas Negeri Gorontalo 29 Juli 2017

Assalamualaikum Wr. Wb. Salam Sejahtera untuk kita sekalian.

Indonesia adalah salah satu negara penyumbang terbesar penduduk dunia. Penduduk Indonesia tahun 2015 mencapai 254,9 juta jiwa, dan tahun 2016 mencapai 257.912.349 jiwa. Dengan penduduk sebesar itu, maka Indonesia masih menempati posisi keempat sebagai negara berpenduduk terbesar di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat. Meningkatnya jumlah penduduk Indonesia itu tidak perlu diperdebatkan lagi. Masalahnya nampak jelas disebabkan oleh pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB) selama 10 tahun lebih mengalami stagnan. Implementasi program KB selamakebijakan desentralisasi pembangunan dan otonomi daerah kurang direspon secara baik oleh Pemerintah Daerah.Padahal urusan keluarga berencana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 merupakan urusan wajib yang harus diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Para pengamat di bidang kependudukan, sesungguhnya tidak terlalu mempersoalkan tentang besar atau kecilnya jumlah penduduk. Jumlah penduduk besar bila dikelola dengan baik, maka penduduk menjadi sumber daya manusia (SDM) yang sangat potensial bagi pembangunan bangsa. Sebaliknya bila tidak dikelola secara serius maka akan berdampak negatif bagi pembangunan bangsa itu sendiri.Hasil riset *Human development Index* (HDI) menunjukkan bahwa kualitas hidup bangsa Indonesia menduduki peringkat ke-108 dari 188 negara di dunia atau urutan ke-6 dari 10 negara-negara ASEAN.

Kondisi inilah yang sedang dialami oleh negara Indonesia, bahwa penduduk yang besar belum disertai dengan kualitas yang memadai sehingga menimbulkan berbagai masalah kependudukan. Hal ini merupakan kelemahan bagi bangsa ini karena untuk menangani masalah kependudukan hanya dikelola oleh lembaga pemerintah nonkementerian. Posisi lembaga ini tentu saja sangat lemah ketika berhadapan dengan lembaga lain setingkat kementerian ketika membicarakan kebijakan tentang kependudukan. Kondisi seperti itu menuntut dibentuknya kementerian kependudukan untuk memetakan jumlah penduduk secara komprehensif.

Tujuan diselenggarakannya Seminar Nasional Kependudukan adalah untuk (1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keluarga berencana dalam mewujudkan suatu pembangunan yang berkelanjutan, (2) Menjadikan keluarga berencana sebagai sarana untuk mengembangkan peranmasyarakat dalam menyeimbangkan antara kebutuhan dan ketersediaan SDA sebagai wujud dari pembangunan berkelanjutan, (3) Menciptakan masyarakat yang aktif, produktif dan kreatif dalam meminimalisir tingkat kemiskinan sebagai wujud kepedulian dalam mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Selaku Ketua Program Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Gorontalo, saya menyampaikan terima kasih kepada (1) para penyaji yang telah menyajikan artikelnya pada seminar nasional dan atau menyerahkan artikel tersebut untuk

#### PROSSIDING SEMINAR NASIONAL KEPENDUDUKAN GORONTALO, 29 JULI 2017

disunting dan akhirnya dimuat dalam prosiding, (2) para penyunting yang bekerja keras menyelesaikan prosiding, (3) para mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Negeri Gorontalo yang membantu mensukseskan penyelenggaraan seminar.

Semoga Prosiding Seminar Nasional Kependudukan Tahun 2017 ini bermanfaat.

Wassalamualaikum Wr. Wb Salam Sejahtera

Gorontalo, 29 Juli 2017

Ketua Program Studi Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup

Dr. Dewi Wahyuni K. Baderan, M.Si

# **DAFTAR ISI**

| KATA PENGANTARii                                                                                                                                                                                             | i   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| DAFTAR ISIv                                                                                                                                                                                                  |     |
| Laporan Ketua Panitia Seminar Nasional Kependudukan Tahun 2017 Universitas Negeri<br>Gorontaloix                                                                                                             |     |
| Panitia Seminar Nasional Kependudukan Tahun 2017xi                                                                                                                                                           | i   |
| Petunjuk Umum Seminar Nasional Kependudukan Tahun 2017xi                                                                                                                                                     | iii |
| MAKALAH UTAMA1                                                                                                                                                                                               |     |
| REVITALISASI PERAN KELUARGA UNTUK MENGATASI MASALAH KEPENDUDUKAN                                                                                                                                             |     |
| Sukamdi2                                                                                                                                                                                                     |     |
| MAKALAH PANEL9                                                                                                                                                                                               |     |
| EKSISTENSI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DI KOTA GORONTALO DALAM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL DAN KETAHANAN KELUARGA Mutia Cherawaty Thalib <sup>1</sup> , Resmiyati Yunus <sup>2</sup> 9                           |     |
| DAMPAK AKTIVITAS PENDUDUK TERHADAP HUTAN MANGROVE DI KAWASAN PESISIR DESA UWEDIKAN DAN DESA LAMBANGAN  Nurain Lapolo <sup>1,3</sup> , Abubakar Sidik Katili <sup>2,3</sup>                                   | 4   |
| PENDIDIKAN SAMPAH)  Putri Ekawaty Kobandaha <sup>1</sup> , Dewisri Surayi Tumiran <sup>2</sup> , Mohamad Mokoginta <sup>3</sup> , Djamal Adi Nugroho Uno <sup>4</sup>                                        | 2   |
| POLA PEMBINAAN KELUARGA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM                                                                                                                                                         |     |
| Nur Mohamad Kasim                                                                                                                                                                                            | .6  |
| PENGEMBANGAN BAHAN AJAR GEOGRAFI BERBASIS AL-QUR'AN PADA MATERI ATMOSFER DI MAN LIMBOTO DAN MAN 1 KOTA GORONTALO                                                                                             |     |
| Usni Rahmawati <sup>1</sup> , Fitryane Lihawa <sup>2</sup> , Sunarty S. Eraku <sup>3</sup> 3                                                                                                                 | 0   |
| PENGEMBANGAN BAHAN AJAR GEOGRAFI BERBASIS AL-QUR'AN PADA MATERI DINAMIKA KEPENDUDUKAN DI INDONESIA                                                                                                           |     |
| Asrin Ntoi <sup>1</sup> , Fitryane Lihawa <sup>2</sup> , Sri Maryati <sup>3</sup>                                                                                                                            | 9   |
| SOLIDARITAS SOSIAL MASYARAKAT PLURALISME DALAM TRADISI PERKAWINAN (SUATU PENELITIAN PADA MASYARAKAT ETNIK GORONTALO DAN MASYARAKAT ETNIK JAWA DI DESA BANDUNG REJO KECAMATAN BOLIYOHUTO KABUPATEN GORONTALO) |     |
| Indra Samaun <sup>1</sup> , Rossy Herawati <sup>c</sup> , Siti Amalia Gobel <sup>3</sup>                                                                                                                     | 17  |

PROSSIDING SEMINAR NASIONAL KEPENDUDUKAN GORONTALO, 29 JULI 2017

| PELAVANAN KESEHATAN M   | MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA  |
|-------------------------|-------------------------------------|
| BERBASIS SISTIM INFORMA | ASI MANAJEMEN DI DESA ALO KABUPATEN |
| BONE BOLANGO PROVINSI   |                                     |

Novianty Djafri 219



# EKSISTENSI PEKERJA RUMAH TANGGA (PRT) DI KOTA GORONTALO DALAM KONTEKS PERUBAHAN SOSIAL DAN KETAHANAN KELUARGA

# EXISTENCE OF DOMESTIC WORKERS (HOUSEHOLD ASSISTANTS) IN GORONTALO CITY THE CONTEXT OF SOCIAL CHANGE AND FAMILY STRENGHT

Mutia Cherawaty Thalib1, Resmiyati Yunus2

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Jl. Jenderal Sudirman No. 6, Kota Gorontalo 96128, Indonesia

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Gorontalo

Email: mutjathalib barryf2@yahoo.com

Abstract:

Pembangunan meliputi semua dimensi dan aspek kehidupan termasuk kehidupan keluarga. Pembangunan senantiasa mengalami proses perubahan secara global, baik perkembangan sosial, ekonomi, budaya, serta teknologi informasi yang dapat memajukan perkembangan masyarakat namun disatu sisi juga dapat mempengaruhi tatanan kehidupan keluarga dalam sebuah rumah tangga. Dalam pelaksanaan kehidupan keluarga tidak saja dilakukan oleh keluarga inti yang terdiri dari suami istri, anak-anak, tetapi bagi keluarga yang berkarir diluar rumah, tentu membutuhkan jasa orang lain baik sanak saudara maupun jasa pekerja rumah tangga, untuk membantu pengasuhan dan perawatan anak terutama balita dan lansia saat suami istri bekerja diluar rumah. Persoalannya adalah eksistensi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Kota Gorontalo, semakin sulit ditemukan dalam pasaran jasa pekerja domestic, yang dipengaruhi oleh perubahan sosial budaya masyarakat serta perkembangan teknologi. Keadaan ini akan berakibat pula terhadap ketahanan keluarga dalam sebuah rumah tangga. Sebagaimana hasil penelitian sebelumnya, bahwa eksistensi PRT di Kota Gorontalo mengalami pergeseran dari ranah jasa pekerja rumah tangga kearah pekerja public seperti pekerja Cleaning Servise, Pramuniaga, Pekerja Pabrik dan lain-lain. Salah satu faktor penyebabnya tidak terpenuhinya jaminan hak PRT, perkembangan budaya kerja PRT, perkembangan pemahaman masyarakat terhadap hak asasi manusia, bahkan perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Perubahan kehidupan sosial masyarakat tidak mungkin dihentikan. Oleh karena itu perlu upaya Pemerintah Daerah, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, dalam menciptakan dan mengoptimalisasikan ketangguhan keluarga untuk berkembang guna hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan lahir batin.

Keywords. Pekerja Rumah Tangga, Perubahan Sosial, Ketahanan Keluarga

# 5. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara dengan seharusnya didunia penduduk terbanyak menjadikan penduduk sebagai salah satu sumber daya manusia yang sangat potensial dalam pembangunan Indonesia, termasuk pembangunan ekonomi. Pertumbuhan makro ekonomi di Indonesia mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Secara perlahan pertumbuhan makro ekonomi telah mampu menurunkan angka pengangguran di Indonesia, namun dengan banyaknya angkatan kerja setiap tahunnya (sekitar 2 juta orang)4 menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Indonesia. Meskipun sebagai negara masalah pembangunan berpenduduk besar, ekonomi sering dihadapkan pada tingginya angka

pengangguran pada usia produktif. Pengganguran ini selain menimbulkan masalah ekonomi, juga berdampak pada masalah lain, seperti masalah social budaya, politik dan keamanan. Jumlah pengangguran di Indonesia tidak merata. Sebagian besar justru wanita. Pada umumnya para wanita bekerja disektor informal, sehingga sebagian orang sering menyebut sebagai pengangguran. Dilain pihak banyak pula wanita yang memilih tidak bekerja dibidang formal, Karena bidang pekerjaan formal lebih cenderung menerima pekerja pria, selain itu bidang pekerjaan formal, menuntut wanita harus meninggalkan rumah dan anak-anak, Karena mereka harus ke kantor atau tempat mereka masalah ini termasuk menjadi bekerja, pertimbangan tersendiri.

Membahas tentang sektor tenaga kerja sangat penting, terutama eksistensi tenaga kerja dalam pasaran tenaga kerja. Penurunan tenaga kerja dalam pasaran kerja berdampak terhadap pasaran kerja dan upah, akhirnya akan berdampak pula terhadap

Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, hal. 56, 2016, Membangun Indonesia duri Desa, Media Pressindo, Yogyakarta

kesejahteraan rumah tangga. Jika secara agrerat kesejahteraan rumah tangga menurun, berarti pembangunan yang ada tidak memberi manfaat

bagi terciptanya kemakmuran bangsa5.

Pasal 5 dan 6 Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kepencudukan dan Pembangunan Keluarga menegaskan bahwa hak penduduk mendapatkan perlindungan, untuk keutuhan, ketahanan mempertahankan kesejahteraan keluarga. Dan disatu sisi kewajiban penduduk salah satunya adalah mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Pengaturan tentang hal ini kemudian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014, dalam Pasal 5 menyatakan bahwa, kebijakan pasonal terhadap hal itu antara lain memberdayakan fungsifungsi keluarga dan memperkuat semangat gotong royong berbasis keluarga. Peraturan ini kemudian direspon oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, dengan Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yang bermaksud mewujudkan dan meningkatkan kemampuan keluarga dalam menciptakan serta mencerdaskan keluarga tangguh. Sehubungan dengan hal itu dijelaskan tentang keluarga yang tangguh, adalah keluarga yang mampu memgembangkan kualitas dirinya, fungsi keluarga, agar dapat hidup mandiri dan mampu mengembangkan kualitas keluarga mewujudkan ketahanan keluarga.

Terkait dengan hal tersebut diatas, dapat digambarkan bahwa potensi sumber daya manusia sebagai Pekerja di Kota Gorontalo semakin berkembang pesat, seiring pembangunannya disegala bidang kehidupan, telah memberi dampak terhadap kehidupan rumah tangga terutama keluarga kecil yang masih produktif. Kaum perempuan pekerja yang beraktifitas diluar rumah sebagai PNS, karyawan public dan swasta, wiraswasta, dan lain-lain, juga semakin tinggi. Bagi keluarga usia produktif, tentunya memiliki anak bayi atau balita atau mempunyai orangtua yang sudah renta dan sakit-sakitan, yang membutuh bantuan orang lain untuk tugas-tugas di dalam rumah tangga, yang disebut Pekerja Rumah Tangga Keadaan ini dapat didukung dengan data dibawah ini:

Tabel:

Data Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang \* Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Gorontalo , 2015

| Kegiatan Utama                    | Jenis Kelemin/Sex |           |              |
|-----------------------------------|-------------------|-----------|--------------|
|                                   | Laki-Laki         | Perempuan | Juniah Total |
| (1)                               | (2)               | (3)       | (4)          |
| Angkatan Kena                     | 56 551            | 41 644    | 98 195       |
| Bekerja                           | 52 656            | 39 508    | 92 161       |
| Penggangguran Terbuka             | 3 895             | 2 136     | 6.031        |
| Bukan Angkatan Kerja              | 16 560            | 36 701    | 53 261       |
| Sekolah                           | 8 552             | 12 274    | 20 826       |
| Mengurus Rumah Tangga             | 4 540             | 23 589    | 28 129       |
| Laintva                           | 3 4 6 8           | 838       | 4 306        |
| Jumlah Total                      | 73 111            | 78 345    | 151 456      |
| Tingkat Partisipasi Angkatan Kena | 77.35             | 53.15     | 64,83        |
| Tingkat Pengangguran              | 6.89              | 5:13      | 5.14         |

Sumber: BPS Kota Gorontalo<sup>6</sup>

Eksistensi PRT masih merupakan polemic, karena belum adanya pengaturan yang jelas dan konkrit tentang PRT, sebagaimana Pekerja lainnya yang sudah ada pengaturannya melalui UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Meskipun demikian sebagai langkah antisipasi, Menteri Tenaga Kerja Rl sudah mengeluarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Rl No. 2 tahun 2015 tentang Perlindung Pekerja Rumah Tangga, sambil menunggu RUU tentang Perlindungan Tenaga Kerja di bahas dan disahkan oleh DPR RI menjadi UU.

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Peneliti, dideskripsikan secara umum, bahwa pemenuhan hak pekerja rumah tangga dalam kenyataan belum terpenuhi secara baik, bahkan banyak menimbulkan persoalan. Demikian pula pemenuhan kewajiban PRT. Faktor penyebabnya antara lain rendahnya kualitas PRT secara individu dan kemampuan yang terbatas dalam menghasilkan mutu pekerjaan, serta budaya kerja yang rendah, juga mengakibatkan banyak persoalan7. Secara khusus, eksistensi PRT dalam pasaran kerja lokal, ada kecenderungan menurun, dalam 3 - 5 tahun tera'khir, tidak seimbang dengan kebutuhan terhadap Jasa PRT semakin tinggi, sedangkan sarana atau lembaga penyalur tenaga kerja PRT lokal yang resmi beroperasi di wilayah ini, belum ada. Perlindungan dan pengawasan hak PRT belum terlindungi oleh Peraturan yang ada, saat ini masih berupa RUU yang menunggu pembahasan dan pengesahannya oleh DPR RI. Pada awal tahun 2015, Menteri Tenaga Kerja RI, melakukan langkah antisipasi mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga sebagai Pedoman Perlindungan Minimal bagi Pekerja Rumah Tangga,yang antara lain mengatur tentang Hubungan Kerja antara Pengguna Jasa perseorangan dengan PRT sebagai Penyedia Jasa melalui Perjanjian kerja baik secara lisan maupun tulisan dengan melibatkan Pemerintah setempat seperti Ketua Rukun Tetangga dalam wilayah tempat tinggal Pengguna Jasa, namun itupun tidak efektif pelaksanaannya terutama di daerah kabupaten kota.

Semakin melemahnya antusias Pekerja Rumah Tangga mempertahankan eksistensinya pada pasaran jasa Pekerja Domestik, berdampak pula terhadap ketahanan keluarga dalam kehidupan rumah tangga, terutama bagi ibu rumah tangga yang berperan ganda sebagai pekerja diruang public, sebagai PNS, karyawan swasta ataupun berwirausaha, yang harus meninggalkan anak-anak

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, Kota Gorontalo dalam Angka, 2016

Mutia Cherawaty Thalib dan Saiful Ibrahim, 2012, Penelitian Fundamental, Perlindungan HakPekerja Rumah Tangga dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bekerja, Lemlit UNG

terutama Balita bahkan pula meninggalkan orangtua yang renta yang justru butuh perhatian dan kasih sayangnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang:

- Bagaimana eksistensi Pekerja Rumah Tangga, di Kota Gorontalo.
- Bagaimana pula dampaknya terhadap ketahanan rumah tangga.

Eksistensi Pekerja Rumah Tangga dan Ruang Lingkup Pengaturannya

## 1. Pengertian dan Ruang Lingkup PRT

Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam satu rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain termasuk yang menginap dan yang tidak menginap Lingkup pekerjaan PRT meliputi pekerjaan di dalam dan di luar rumah tangga. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pekerja rumah tangga (PRT)

b. penata laksana rumah tangga (PLRT);

c. pembantu pelayan jompo (caretaker);

d. penjaga bayi (baby sitter);

e. penjaga anak (nanny);

f. pengasuh anak (governess);

g. pelayan jompo (caregiver).

Pekerjaan di luar rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tukang kebun, supir pribadi, satpam pribadi, dan guru privat (guru mengaji).

Sedangkan menurut Kepmenaker No 2 tahun 2015 dinyatakan bahwa Pekerja Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PRT adalah orang yang bekerja pada orang perseorangan dalam rumah tangga untuk melaksanakan pekerjaan kerumahtanggaan dengan menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain.

#### 2. Eksistensi PRT di Kota Gorontalo

Hasil penelitian sbelumnya menunjukan bahwa ditinjau dari aspek sosiologis masih terdapat fenomena hubungan kerja yang mengarah kepada penemuhan hak dan kewajiban yang tidak seimbang yang dilatarbelakangi oleh factor pengetahuan, ketrampilan, budaya masyarakat, kehidupan sosial ekonomi serta pandangan masyarakat terhadap kedudukan I'RT. Dari aspek yuridis belum terdapat Undang-undang yang mengatur hubungan kerja dalam rumah tangga, sehingga sebagai langkah antisipasi lahirlah Permenakertrans No. 2 tahun 2015 untuk mengisi kekosongan hukum, namun keberadaannya dianggap belum memberikan kedudukan fungsi yang baik karena belum ada payung hukumnya. Sedangkan dipandang dari aspek filsafat hukum, perlu adanya perhatian semua pihak terhadap kedudukan PRT dipandang dari hubungan nilai, moral dan kaidah perlu kiranya dibuatkan regulasi terhadap hubungan kerja antara PRT, Pengguna Jasa PRT serta Lembagu Penyalur PRT agar tercipta kondisi bekerja yang seimbang yang mencerminkan terpenuhinya hak dan kewajibar bagi semua unsure-unsur yang terkait dalam pekerjaan rumah tangga. <sup>5</sup>Pengaturan Pekerja Rumah Tangga (PRT), masih berada di luar jangkauan pengaturan ketenagakerjaan secara umum. Sehingga sangat sering terjadi masalah antara Fekerja Rumah Tangga dengan Pemberi Kerja terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Peneliti sendiri tahun 2012<sup>8</sup>. Keadaan teraga kerja pada tahun ini menunjukan bahwa dalam prakteknya di Kota Gorontalo yang penduduknya berjumlah 202.202 orang, dengan tingkat kesibukan yang semakin tinggi, dengan kedudukan sebagai tenaga kerja produktif atau angkatan kerja baik yang bekerja maupun pengangguran berjumlah 98.195 orang dan bukan angkatan kerja yang terdiri dari yang sekolah dan mengurus rumah tangga ada 53.2619 orang, sangat memerlukan bantuan dari pihak lain sebagai Pekerja Rumah Tangga dalam membantu pekerjaan tangga. Namun dalam kenyataan rumah sebagaimana pengamatan dan pengalaman dalam kehidupan social, minat tenaga kerja yang bekerja disektor jasa sebagai Pekerja Rumah Tangga, semakin menurun bahkan eksistensinya cenderung lenyap dari pasaran kerja. Jika mengacu pada data BPS tahun 2016, Pekerja Rumah Tangga termasuk dalam data penduduk yang bekerja disektor jasa kemasyarakatan, sosial personal perseorangan/komunitas, social dan service, berjumlah 32.672 orang terdiri dari lakilaki dan perempuan10. Hal yang menjadi penyebab adalah belum terpenuhinya hak dan kewajiban dalam hubungan kerja antara Pengguna Jasa dengan PRT sebagai Penyedia Jasa. Faktor yang mempengaruhinya adalah rendahnya pemahaman terhadap HAM, kualitas kerja serta bucaya kerja yang buruk, sementara itu peran Lembaga Penyalur PRT tidak maksimal, terhambat izin opersional oleh Pemerintah dengan alasan payung hukum yang mengatur tentang PRT belum ada.

Hasil penelitian selanjutnya mengemukakan bahwa telah terjadi pergeseran ruang lingkup pekerjaan dari domestic kearah public, dengan beralih dari Pekerja Rumah Tangga ke Pramuniaga, Cleaning Service pada perusahaan outschorcing, Rumah Makan atau Restoran. Dengan melemahnya eksistensi PRT dalam pasaran kerja jasa domestic, tentunya berdampak pula terhadap ketahanan keluarga. Bergesernya peran PRT dalam

<sup>8</sup> Loc Cit, hal 43

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo, Kota Gorontalo dalam Angka Tahun 2016

<sup>10</sup> ibid

ruanglingkup pekerjaan, akan menimbulkan akibat bagi keluarga yang termasuk angkatan kerja yang bekerja, yang tergolong usia produktif, yang memiliki balita dan anak usia dini serta mempunyai anggota keluarga lansia yang butuh bantuan pengasuhan. Jika ini dialami oleh keluarga yang dalam kondisi tidak siap baik secara fisik dan mental akan berdampak terhadap psykologi keluarga ataupun tatanan keluarga. Keadaan ini menunjukkan hal yang terkait dengan Ketahanan Keluarga.

#### Konsep Ketahanan Keluarga dan Program Pemerintah Daerah

## 1. Konsep Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan konsep yang memiliki pengertian dan cakupan yang luas dan beragam. Keluarga merupakan unit/institusi/sistem sosial terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan sekelompok orang atas dasar hubungan perkawinan, pertalian darah atau adopsi yang tinggal bersama dalam sebuah rumah tangga.

Frankenbergen (tahun 1998) mendefinisikan Ketahanan Keluarga merupakan kondisi kecukupan dan kesinambungan akses terhadap pendapatan dan sumber daya untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar, antara lain, pangan, air bersih, pelayanan kesehatan, kesempatan pendidikan, perumahan, waktu untuk berpartisipasi dimasyarakat dan integrasi sosial. Pandangan lain mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamik keluarga yang memiliki keuletan, ketangguhan, dan kemampuan fisik, materiil dan mental, untuk hidup secara harmonis, sejahtera, dan bahagia lahir batin. Dalam pandangan lain pula, Sunarti mendefinisikan Ketahanan Keluarga, mencakup kemampuan keluarga untuk mengelola sumber daya dan masalah untuk mencapai kesejahteraan, kemampuan untuk bertahan, dan beradaptasi terhadap berbagai kondisi yang senantiasa berubah secara dinamis serta memiliki sikap positif terhadap berbagai tantangan kehidupan keluarga. Secara yuridis Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan perkembangan keluarga sejahtera, menyebutkan bahwa ketahanan keluarga berfungsi sebagai alat untuk mengukur seberapa jauh keluarga telah melaksanakan peranan, tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu keluarga perlu dibina dan dikembangkan kualitasnya agar menjadi keluarga sejahtera, serta menjadi sumber daya efektif bagi pembangunan nasional.11

# 2. Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga

Penyelenggaran Pembangunan Ketahanan Keluarga, dapat dilakukan melalui perencanaan program kegiatan penyediaan dana dan jasa, sarana dan prasarana. Asumsi penulis bahwa jasa PRT, merupakan bagian dari unsure yang dimaksud turut menjadi perhatian dalam per.yelengaraan pembangunan ketahanan keluarga. Hal pengasuhan anak dapat diberikan perannya pada masyarakat melalui tenaga pengasuh yang dibentuk melalui lembaga penitipan anak, selama ibunya bekerja. Perlu pula direncanakan adanya sarana prasarana rekayasa sosial berupa Lembaga pelatihan bagi jasa perawat kaum Lansia. Pemerintah Daerah dalam hal ini berkewajiban melakukan kerjasama dengan Provinsi lain, dengan daerah Kabupaten Kota, dengan instansi terkait, lembaga pendidikan, dan Lembaga Swadaya Masyarakat serta Pelaku Sosial, lain-lain dalam menyelenggarakan pembangunan ketahanan keluarga. Sedangkan pembinaan terhadap anggota keluarga perlu dibekali dengan kemampuan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam keluarga tempatnya bekerja yang dapat dilakukan dengan pembinaan dari Pemberi Kerja maupun melalui instansi terkait seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, sebagai wujud perlindungan bagi keluarga menuju keluarga yang berkualitas, dan sejahtera.

## 6. PENUTUP

Eksistensi Pekerja Rumah Tangga di Kota Gorontalo cenderung menurun dalam wilayah pasaran kerja jasa domestic, dengan adanya perubahan sosial, ekonomi masyarakat, dan peningkatan pembangunan disegala sector kehidupan termasuk budaya dan pernahaman masyarakat terhadap Hak Asasi Manusia.

Keadaan ini tidak harus melemahkan kesiapan rumah tangga terutama usia produktif yang masih begitu bersemangat membangun ekonomi keluarga. Perubahan keluarga akan selalu terjadi karena keluarga akan selalu beradaptasi terhadap perubahan ekonomi, sosial dan kekuatan politik. Semakin ada usaha untuk memahami perubahan yang dilakukan oleh keluarga dan dampaknya terhadap kehidupan keluarga, semakin penting mengembangkan kebijakan sosial untuk mendampingi keluarga dalam menyesuaikan perubahan tersebut<sup>12</sup>.

Pemerintah Nasional hingga Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo mengantisipasi keadaan ini salah satunya dengan mengesahkan Perda Provinsi Gorontalo tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga, yang perlu direspon oleh

<sup>11</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2016, "Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016", CV.Lintas Katulistiwa

Herien Puspitawati, 2013, Pengantar Studi Keluarga, PT. Penerbit IPB Press, Bogor

Pemerintah daerah Kota Gorontalo melalui perencanaan, pelaksanaan dan Pengawasan terhadap program pembinaan dan peningkatan kualitas kehidupan keluarga dalam meningkatkan kesejahteraan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Badan Pusat Statistik , ISSN : 2088-6292 , Kota Gorontalo dalam Angka , 2016

Herien Puspitawati, 2013, Pengantar Studi Keluarga, PT. Penerbit IPB Press, Bogor

Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, 2016, Membangun Indonesia dari Desa, Media Pressindo, Yogyakarta

Mutia Cherawaty Thalib dan Saiful Ibrahim, 2012, Penelitian Fundamental, Perlindungan HakPekerja Rumah Tangga dalam Pemenuhan Hak dan Kewajiban Bekerja, Lemlit UNG

Sonny Harry Harmadi dan Sujono Tjiptoherijanto, 2009, Kependudukan Indonesia, LIPI Press, Jakarta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik, 2016 Pembangunan Ketahanan Keluarga, CV.Lintas Katulistiwa

#### Peraturan Perundangan-undangan

Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistim Informasi Keluarga

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembangunan Ketahanan Kebuarga

Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga